

BAB IV KESIMPULAN

Krisis dan konflik yang terjadi di Somalia merupakan akibat dari runtuhnya institusi pemerintahan yang disebabkan konflik perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok oposisi pasca jatuhnya Siyad Barre di tahun 1991. AMISOM (*African Union Mission in Somalia*) Sebagai sebuah misi bentukan Uni Afrika memperlihatkan kinerja yang baik dalam bidang keamanan, terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi baik eksternal maupun internal. Terbukti bahwa AMISOM mampu membebaskan beberapa wilayah penting dari Al-Shabaab seperti Kismayo dan Mogadishu, dimana wilayah tersebut merupakan *key area* dalam pelaksanaan tugas pemerintahan transisi. Kemajuan yang didapatkan mampu membatasi ruang gerak Al-Shabaab. Keberhasilan dalam mengamankan wilayah-wilayah penting di Somalia juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam terciptanya pemerintahan baru Somalia yang disebut dengan *Federal Government of Somalia* (FGS).

Akan tetapi, beberapa oknum dari pasukan AMISOM dalam misi perdamaianya tersebut telah melanggar hak asasi manusia yaitu *personal security*. Dimana mereka mengambil secara paksa hak para perempuan untuk mendapatkan kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*) dan kebebasan dari keinginan (*freedom from want*) yang menjadi tolak ukur dari pelanggaran terhadap *personal security*. *African Union* selaku organisasi internasional-regional di kawasan Afrika masih dirasa kurang dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan baru yang timbul dari misi perdamaian di Somalia (AMISOM). Respon *African Union* dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus kekerasan seksual oleh pasukan AMISOM masih dirasa kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari laporan investigasi yang dilakukan oleh *African Union* tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Beberapa tentara AMISOM, yang dikerahkan ke Somalia sejak tahun 2007 untuk membantu memulihkan stabilitas di Mogadishu, telah menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi wanita dan anak dibawah umur. Mereka juga telah melakukan tindakan pemerkosaan dan bentuk pelecehan seksual lainnya, serta eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual melibatkan penyalahgunaan posisi rentan, kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual mereka yang dapat dikategorikan sebagai *gender-based violence* (GBV).